

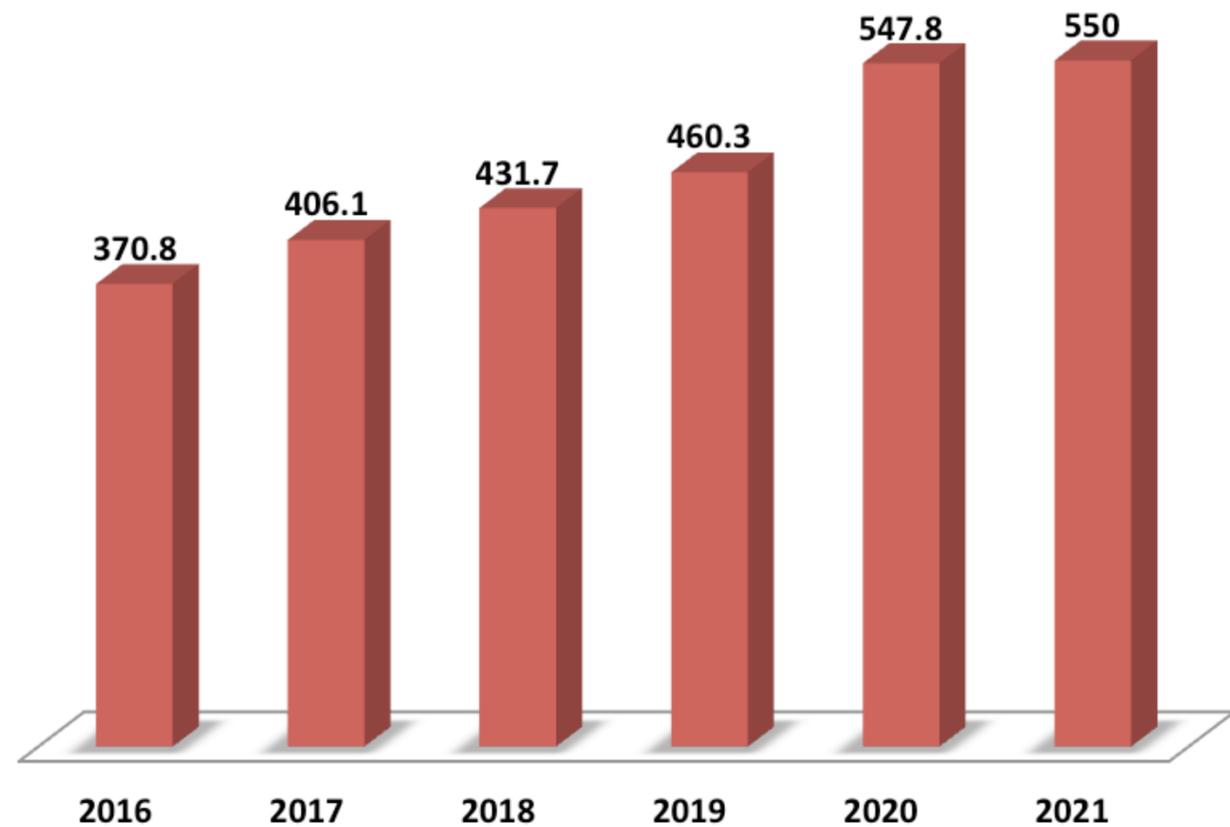
**Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan:
Pendidikan di Tengah
Kepungan Korupsi**



**Indonesia Corruption Watch
2021**



Latar Belakang



Alokasi APBN untuk Sektor Pendidikan (Kemenkeu, 2021)

- Pendidikan adalah pelayanan publik dasar yang mendapat alokasi anggaran cukup tinggi, minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai mandat UUD 1945 dan UU Sisdiknas.

-
- Mutu pelayanan pendidikan di Indonesia masih belum prima. Skor survei *Program for International Student Assessment (PISA)* Indonesia pada 2018 kembali menempatkan Indonesia di peringkat belakang (72 dari 77 negara) dengan skor rata-rata 382 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Stagnan dari tahun 2003.

-
- Peningkatan anggaran sektor pendidikan belum berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Korupsi Sektor Pendidikan?

Korupsi yang terjadi terkait dengan pelayanan pendidikan (dilihat dari peruntukan anggarannya, pelaku korupsinya, dan/ atau instansi terjadinya korupsi).



- Sektor pendidikan selalu masuk dalam top 5 korupsi yang ditindak oleh APH (ICW, 2016-2021)
-



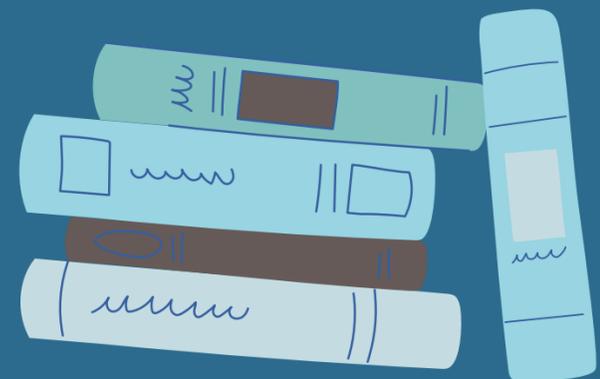
- Seberapa masif korupsi sektor pendidikan jika dilihat dari penindakan yang dilakukan oleh APH?
- Bidang/ program apa yang paling banyak dikorupsi?
- Mengapa korupsi sektor pendidikan banyak terjadi dan berulang?
- Apa yang perlu dibenahi agar korupsi pendidikan dapat diminimalisir?



Pengumpulan Data

(Oktober 2020-September 2021)

- **Korupsi sektor pendidikan yang ditindak oleh APH pada rentang waktu 2016 hingga September 2021**
-
- **Sumber data:**
 - Website APH
 - Putusan kasus korupsi pendidikan
 - Pemberitaan media
-
- **Pendalaman kajian:**
 - Observasi lapangan
 - Wawancara



Tren Penindakan Kasus Korupsi Pendidikan

2003-2013:

296 kasus,
kerugian negara
Rp 619 miliar

- Korupsi yang ditindak masih jauh lebih kecil dari penyelewengan dana pendidikan yang ada.
- Audit BPK: 6 dari 10 sekolah menyimpangkan dana BOS dengan rata-rata penyimpangan Rp 13,7 juta persekolah (ICW, 2010)

2006-2015:

425 kasus,
kerugian negara
Rp 1,3 triliun

- Dana yang paling rentan dikorupsi pada sektor pendidikan adalah DAK dan BOS dengan modus penggelapan dan mark up anggaran.



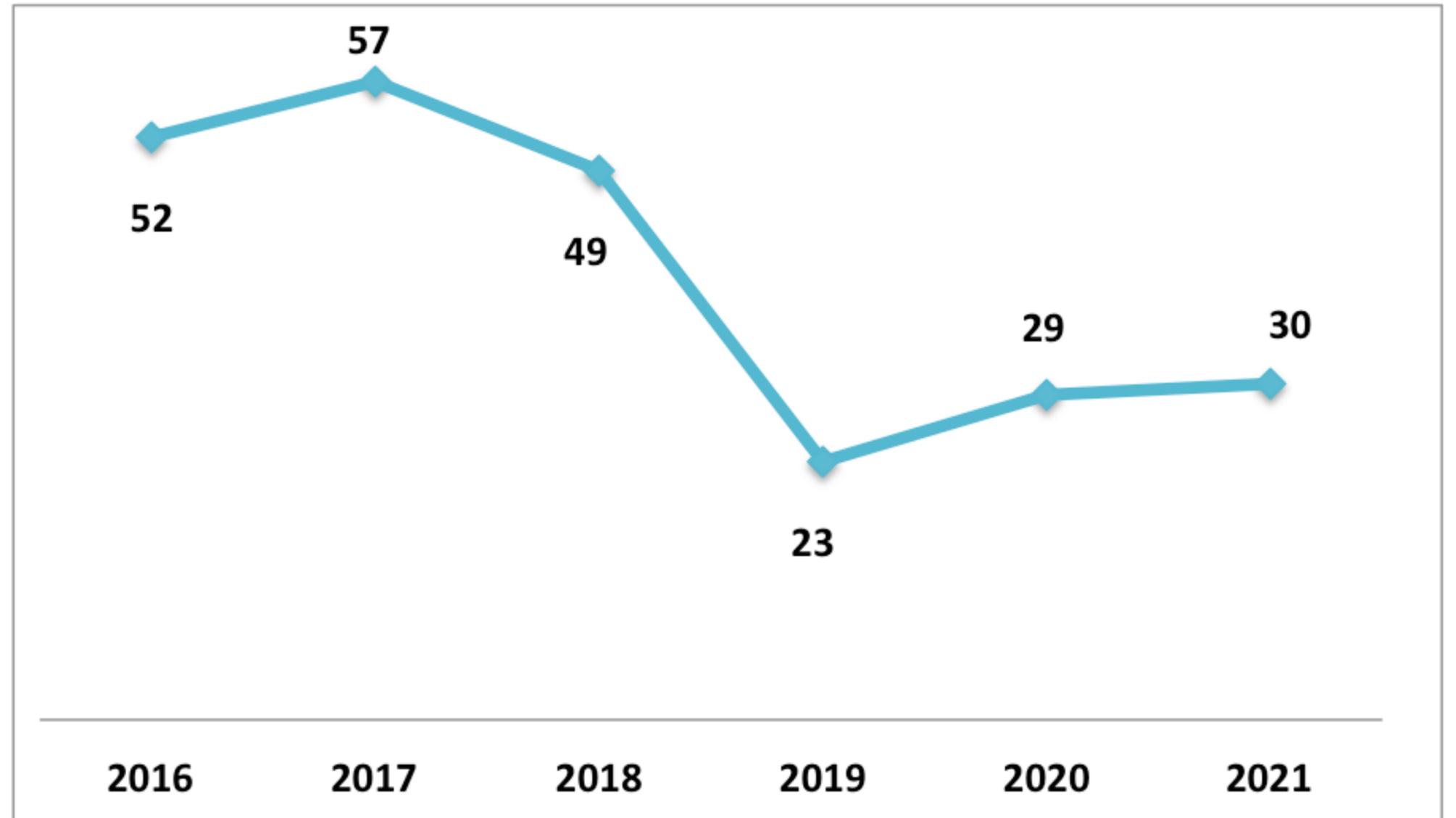
Keterbatasan Kajian:

- Bersumber dari pengumpulan mandiri atas data penindakan kasus korupsi yang ditindak APH, kajian ini tidak dapat menyimpulkan meningkat atau menurunnya korupsi sektor pendidikan.
 - Terdapat faktor keaktifan dan fokus APH dalam melakukan penindakan kasus korupsi.
- Namun, dari kajian ini cukup tergambar masifnya korupsi sektor pendidikan dan titik permasalahannya.



**240 Kasus,
Kerugian Negara Mencapai
Rp 1,605 Triliun.**

**Jika ditarik mundur sejak 2006
hingga September 2021, terdapat 665
kasus korupsi pendidikan yang
ditindak APH dengan kerugian
negara Rp 2,905 triliun.**



Sunat Duit untuk Sekolah, Eks Bupati Cianjur Divonis 5 Tahun

Reporter: [Iqbal Tawakal Lazuardi \(Kontributor\)](#)

Editor: [Juli Hantoro](#)

Senin, 9 September 2019 20:08 WIB

KOMENTAR



Bupati nonaktif Cianjur Irwan Rivano Muchtar bersiap meninggalkan gedung KPK setelah diperiksa, di Jaksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima atau memotong pembayaran terkait Dana Alokasi Khusus 2018. TEMPO/Imam Sukanto

Akibat Jaksa Main Proyek, Siswa Belajar di Poskamling



Siswa kelas 6 SDN Bangunrejo 2 Yogyakarta mengikuti pelajaran tambahan di poskamling sejak Desember

medcom.id

Nasional News Lifestyle Sains Pilar Cek Fakta Video Foto Grafis Live Tv Magna Chanr

Politik Peristiwa Hukum Metro Daerah

HOME — NASIONAL — DAERAH



Atap SDN Gentong I ambruk. (Dok. BPBD Kota Pasuruan)

PNS Disdik Kota Pasuruan Tersangka Korupsi Sekolah Ambruk

Nasional ■ sekolah ambruk

Tahun	Terjadinya Korupsi	Penindakan
2007	2	
2008	0	
2009	5	
2010	7	
2011	13	
2012	23	
2013	17	
2014	37	
2015	34	
2016	34	52
2017	40	57
2018	31	49
2019	20	23
2020	11	29
2021	1	30
Total	275	240

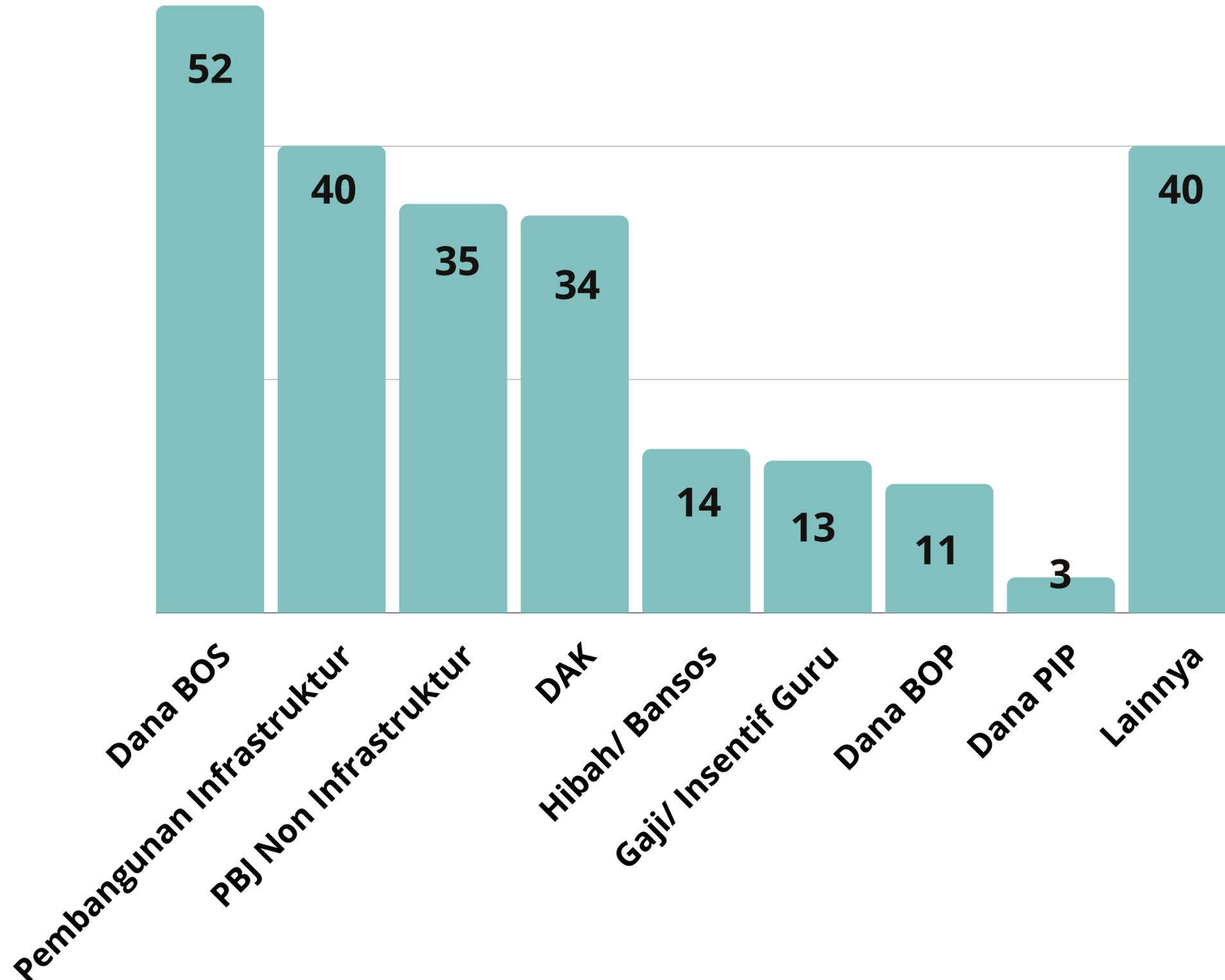
Korupsi sektor pendidikan berdasarkan tahun terjadi

- Terlihat bahwa korupsi sektor pendidikan tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19.
- 4 kasus korupsi yang terjadi di tengah pandemi merupakan korupsi BOP dari Kemenag untuk penanganan Covid-19 di pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Takalar, dan Kota Pasuruan.

Korupsi BOP Kemenag, Marak di Tengah Pandemi Covid-19

- 4 kasus telah ditindak oleh APH pada 2021, diyakini korupsi objek yang sama juga terjadi di daerah lain.
-
- Penelusuran ICW dan jaringan di Aceh dan Medan menemukan dugaan penyalahgunaan BOP Kemenag yaitu:
 - Bantuan disalurkan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang tidak memenuhi syarat.
 - Lembaga penerima tidak menggunakan BOP Kemenag sesuai dengan peruntukan.
 - Bantuan disalurkan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan fiktif.
 - Bantuan tidak disalurkan kepada pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan.
 - Pemotongan bantuan sehingga penerima tidak menerima BOP sejumlah yang seharusnya mereka terima dengan alasan untuk uang jasa, uang administrasi, dll.
-
- Bagaimana agar BOP Kemenag tidak dikorupsi/ disalahgunakan?

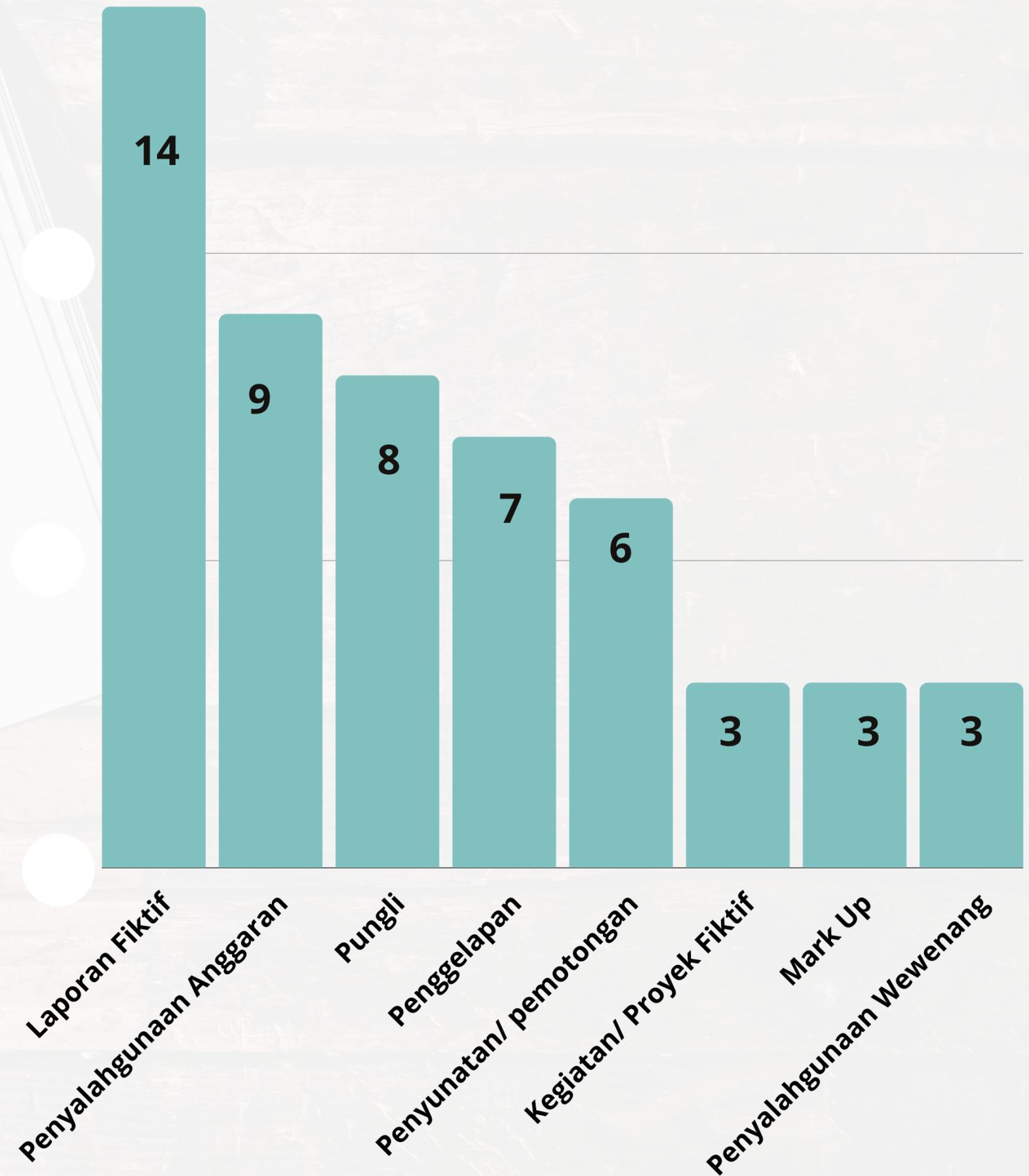
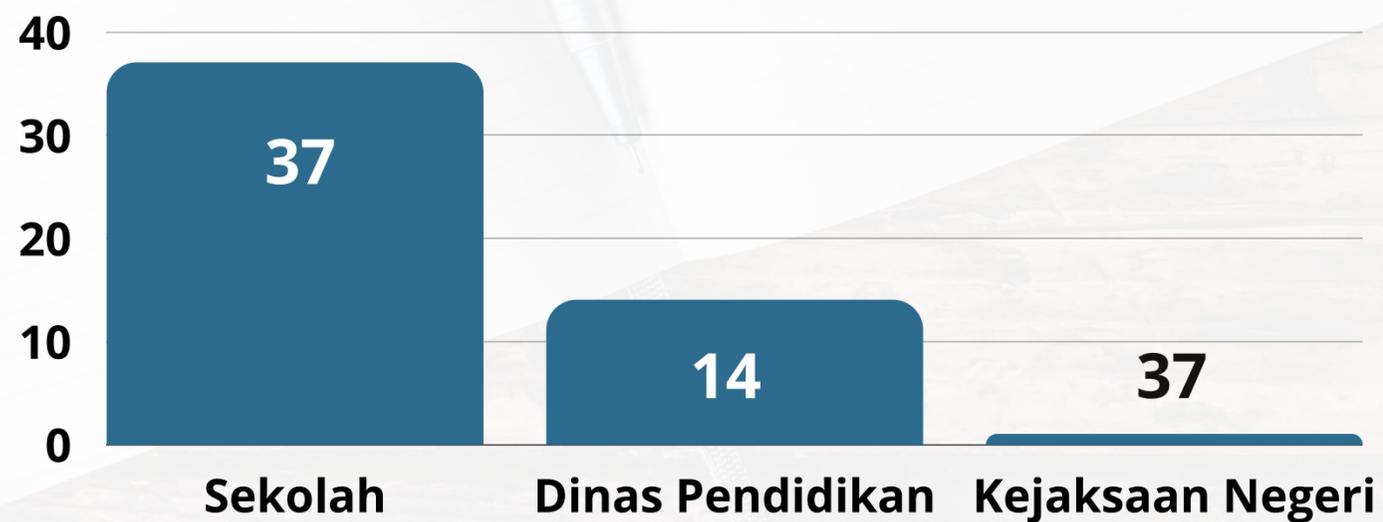
Korupsi Sektor Pendidikan yang Ditindak APH Berdasarkan Program/ Penggunaannya



- Keterbatasan informasi detail mengenai kasus menyulitkan kita dalam mengidentifikasi program yang dikorupsi.
- Namun setidaknya tergambar bahwa dana BOS dan DAK adalah dua program yang kerap disalahgunakan penggunaannya.
- Jika digabung dengan korupsi dana BOS, DAK, dan hibah yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, terdapat total 61 korupsi pembangunan infrastruktur.
- Lainnya yaitu kasus-kasus pungli, korupsi DAU, dana otsus, program Kemendikbud, dst.

Korupsi Dana BOS

- Perubahan mekanisme transfer dana BOS dari yang sebelumnya ditransfer ke RKUD menjadi langsung ke rekening sekolah (Permendikbud 8/2020 dan 6/2021) cukup berdampak positif:
 - Dapat mengurangi celah pungli percepatan pencairan dana BOS dari Dinas Pendidikan ke sekolah.
- Namun, korupsi dana BOS umumnya juga terjadi di level sekolah. Bagaimana mengantisipasinya?



Korupsi Dana BOS TA 2020

- Dugaan korupsi dana BOS di Bitung (2020)
 - Sekretaris Dinas Pendidikan diduga melakukan pungutan terhadap 11 kepala sekolah.
 - Modus pungutan yaitu dengan menjadwalkan pencairan dana BOS di sebuah bank dan selanjutnya kepala sekolah dimintai setoran sebagai timbal balik jasa dalam seleksi kepala sekolah.
 - Uang pungutan diduga mencapai Rp 300 juta.
- Dugaan korupsi dana BOS di SMP Negeri 1 Reok, Manggarai (2020)
 - Korupsi dana BOS diduga telah terjadi sejak 2017 hingga 2020 dengan total kerugian negara mencapai Rp 839,4 juta atau 40% dari dana BOS yang sekolah terima.
 - Modusnya yaitu sekolah membuat kegiatan fiktif atau kegiatan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan *mark up* penggunaan anggaran kegiatan.
 - Dana BOS diduga dibagi-bagi kepada guru dan pegawai.

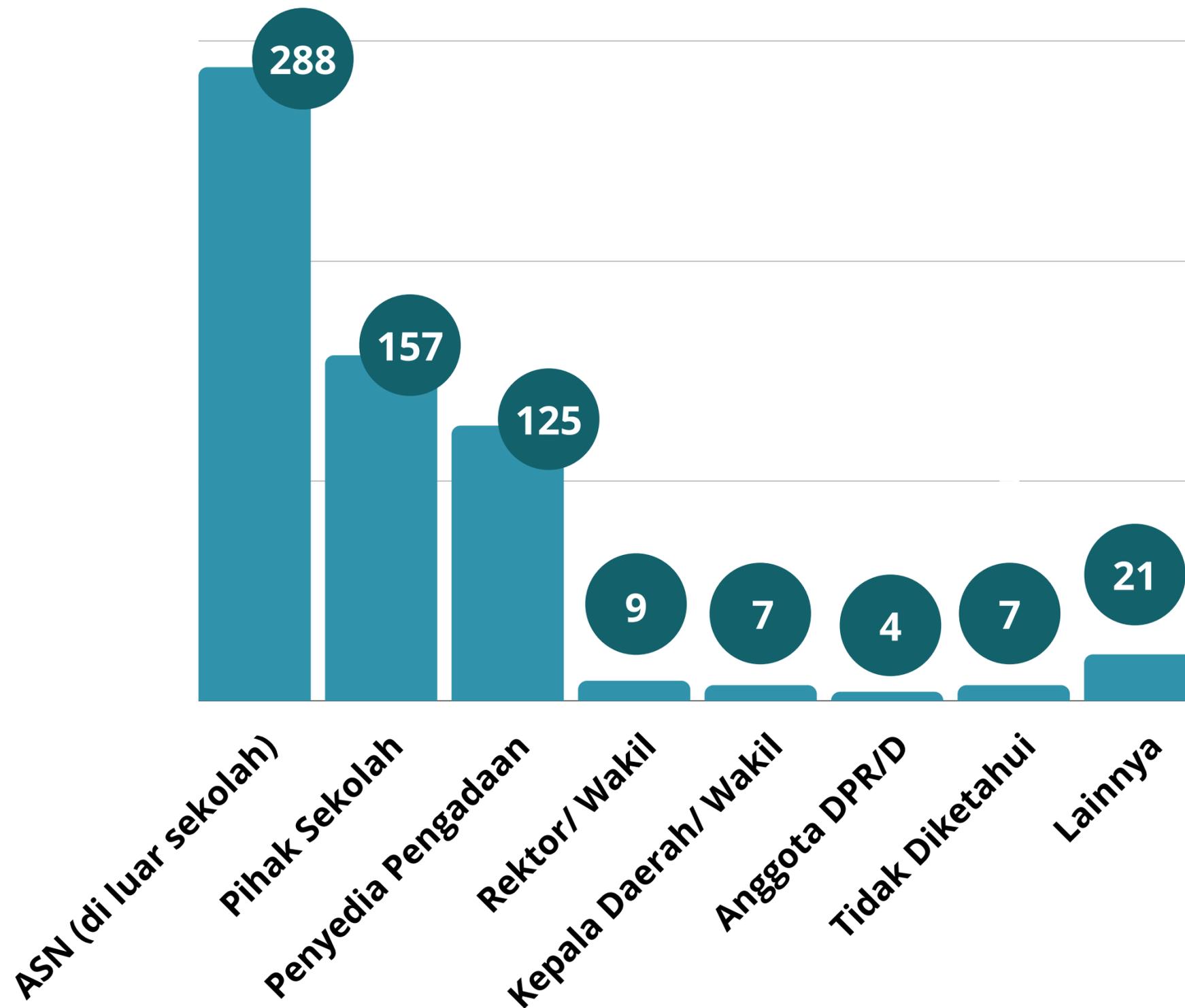
Korupsi DAK

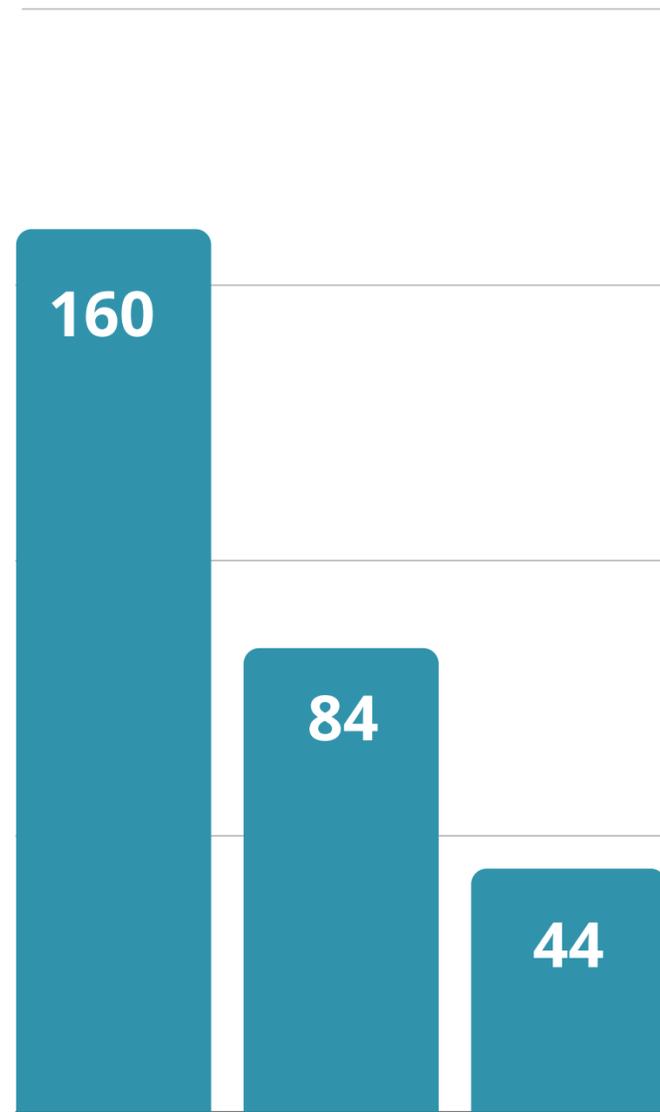
Penggunaan DAK yang Dikorupsi	Jumlah Kasus
Pembangunan fisik	15
Alat peraga	7
Pemotongan anggaran	4
Komputer/ laptop	3
Kapal untuk praktik SMK	2
Buku	1
Mebelair	1
Tidak diketahui	1
Total	34

- 26 kasus korupsi DAK terjadi di Dinas Pendidikan pada tahun 2007-2020 (tahun terjadinya korupsi).
- Modus umum: Mark up anggaran (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungutan liar atau pemerasan (12,6%).
- Pungli yang terjadi yaitu misalnya berkaitan dengan sertifikasi guru, pencairan dana BOP dan BOS sebelum tahun 2020, try out, dan pembangunan fisik.
 - Pungli pembangunan fisik bahkan mencapai 10-12,5% dari total nilai proyek, seperti yang terjadi dalam kasus korupsi DAK TA 2019 se Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

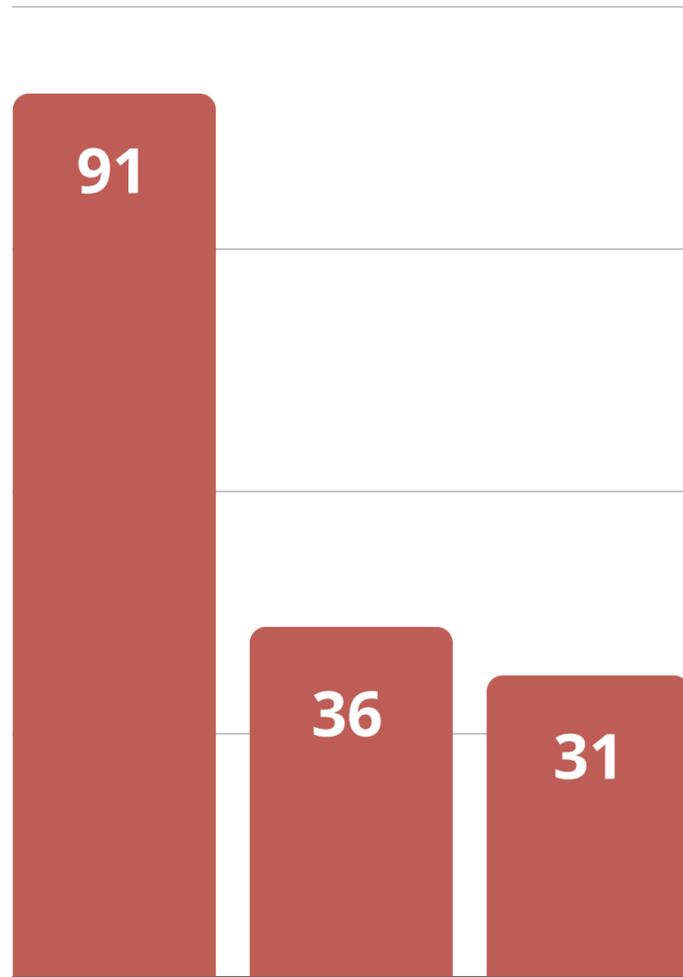
Background Tersangka: Dari Guru Hingga Bupati

- Sama dengan tren penindakan kasus korupsi secara umum, ASN adalah pihak yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka oleh APH di korupsi sektor pendidikan (46,4%).
- Terbanyak kedua berasal dari pihak sekolah, yaitu 25% (terdapat ASN juga didalamnya).
- Terbanyak ketiga berasal dari penyedia atau rekanan pengadaan (20,1%).





ASN Staf Dinas Pendidikan
ASN Instansi Lain
Kepala Dinas Pendidikan



Kepala/ Wakil
Guru/ Pihak Lain
Bendahara/ Staf Keuangan

Background Tersangka

- Dilihat lebih rinci, ASN yang menjadi tersangka terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan, baik staf atau pun kepala dinas.
- Sedangkan dari sekolah, tersangka terbanyak yaitu kepala sekolah.

Kepala Daerah dan Korupsi Sektor Pendidikan



Foto: Kompas.com

7 Kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sektor pendidikan pada 2016-2021 dengan kasus:

- Korupsi beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa berprestasi di Kab. Jembrana (2009)
- Korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) NTT (2007)
- Suap ijon proyek-proyek di Dinas Pendidikan Kab. Banyuasin (2016)
- Korupsi Pengadaan Paket Bantuan Siswa Kurang Mampu di Kab. Lampung Timur (2012)
- Korupsi pembangunan ruang kelas baru di SMK Al Hidayah Hulu Sungai Tengah (2012)
- Pemotongan DAK di Kab. Cianjur sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar (2018)
- Suap proyek pembangunan SMP di Kota Blitar (2018)

Dari 7 kepala daerah tersangka korupsi pendidikan, 5 diantaranya diketahui telah divonis dengan rata-rata hukuman pidana penjara 5 tahun 3 bulan.

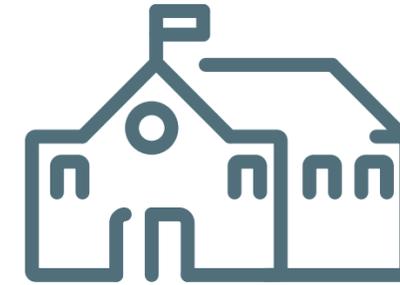
- Hanya 1 kepala daerah yang dikenai hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun, yaitu Bupati Banyuasin Yan Anton.

Korupsi sektor pendidikan yang ditindak APH 2016-September 2021 berdasarkan sebaran instansi terjadinya korupsi

- Sejalan dengan data bahwa tersangka terbanyak yaitu ASN Dinas Pendidikan, korupsi sektor pendidikan juga mayoritas terjadi di Dinas Pendidikan.
 - Umumnya terkait pengadaan infrastruktur dan non infrastruktur yang menggunakan DAK.
 - Modus yang paling umum terjadi yaitu mark up (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungli/ pemerasan (12,6%)



Dinas Pendidikan
125 kasus (52%)



Sekolah
75 kasus (31%)



Perguruan Tinggi
20 kasus (0,8%)



Kementerian/ Kanwil
9 kasus (0,4%)



Dinas Lainnya
8 kasus (0,3%)

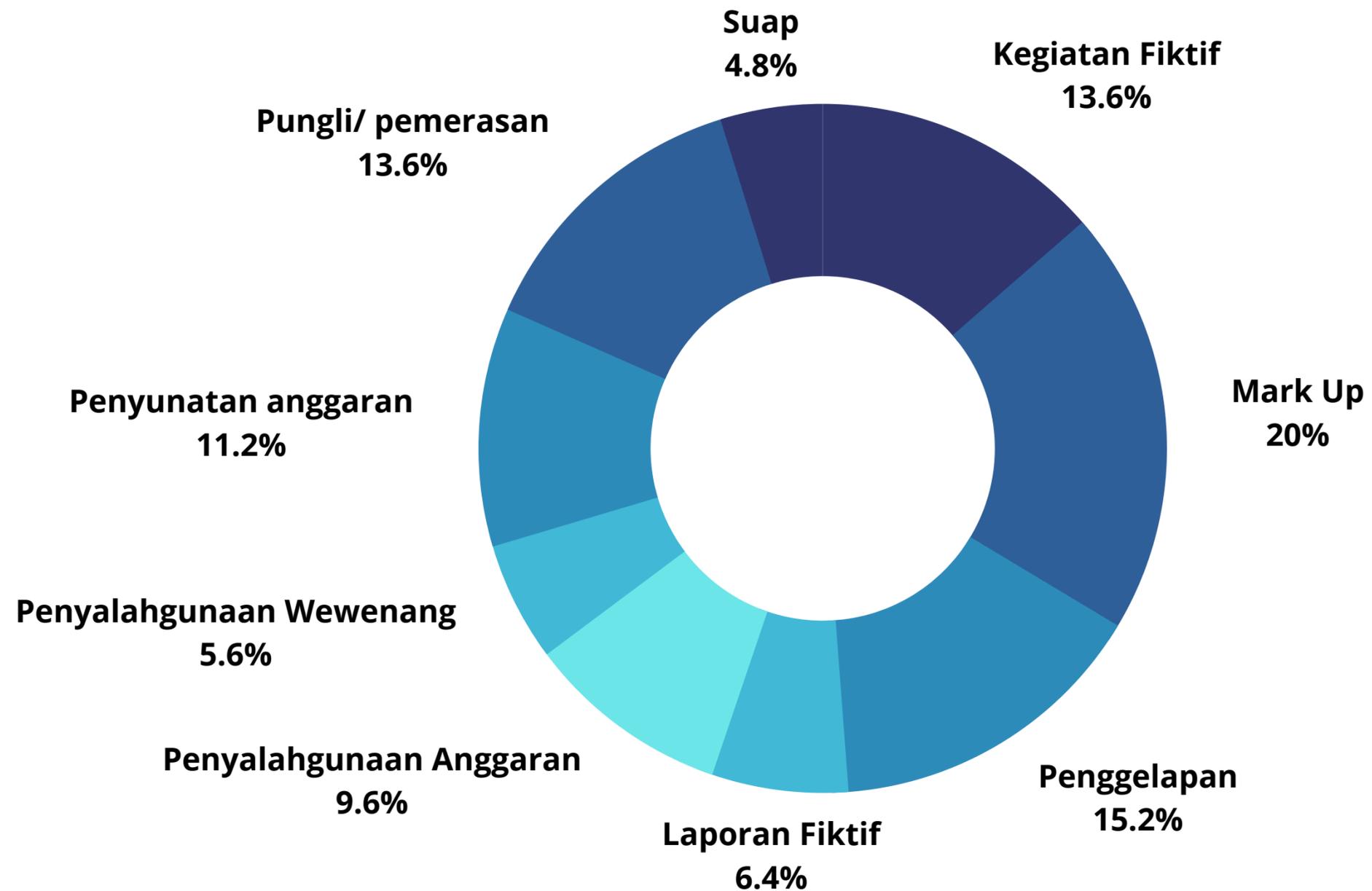


APH
1 kasus



Lainnya
2 kasus

Korupsi di Dinas Pendidikan



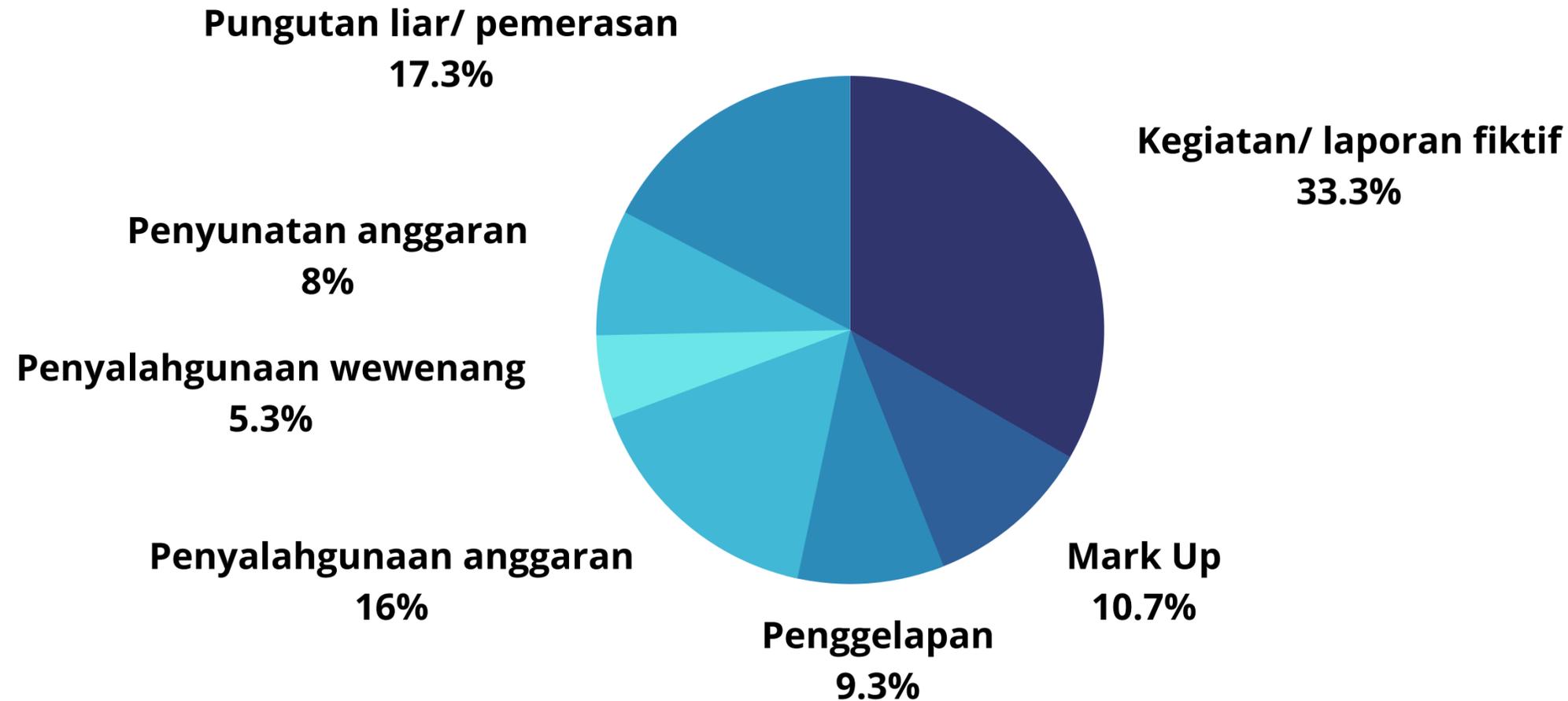
- Dinas pendidikan menempati posisi teratas sebagai instansi terjadinya korupsi sektor pendidikan terbanyak.
- Korupsi di Dinas Pendidikan umumnya terkait pengadaan infrastruktur maupun non infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau APBD.
- Kerugian negara yang ditimbulkan korupsi di Dinas Pendidikan mencapai Rp 225,2 miliar dengan modus umum mark up anggaran (20%).

Korupsi di Sekolah

- **Sepertiga kasus korupsi pendidikan terjadi di sekolah dan melibatkan kepala sekolah.**

- 49% (37 dari 75) kasus yang terjadi di sekolah berkaitan dengan penggunaan dana BOS.
- 8 kasus merupakan korupsi DAK yang dilakukan bersama dengan tersangka dari Dinas Pendidikan.

- Korupsi di sekolah umumnya bermodus proyek fiktif dan laporan fiktif.
- Modus terbanyak kedua yaitu pungli dengan beragam kedok, seperti pungli penerimaan siswa baru, try out, sertifikasi guru, dana UN, surat keterangan lulus, dll.



Pungutan liar/ pemerasan
17.3%

Kegiatan/ laporan fiktif
33.3%

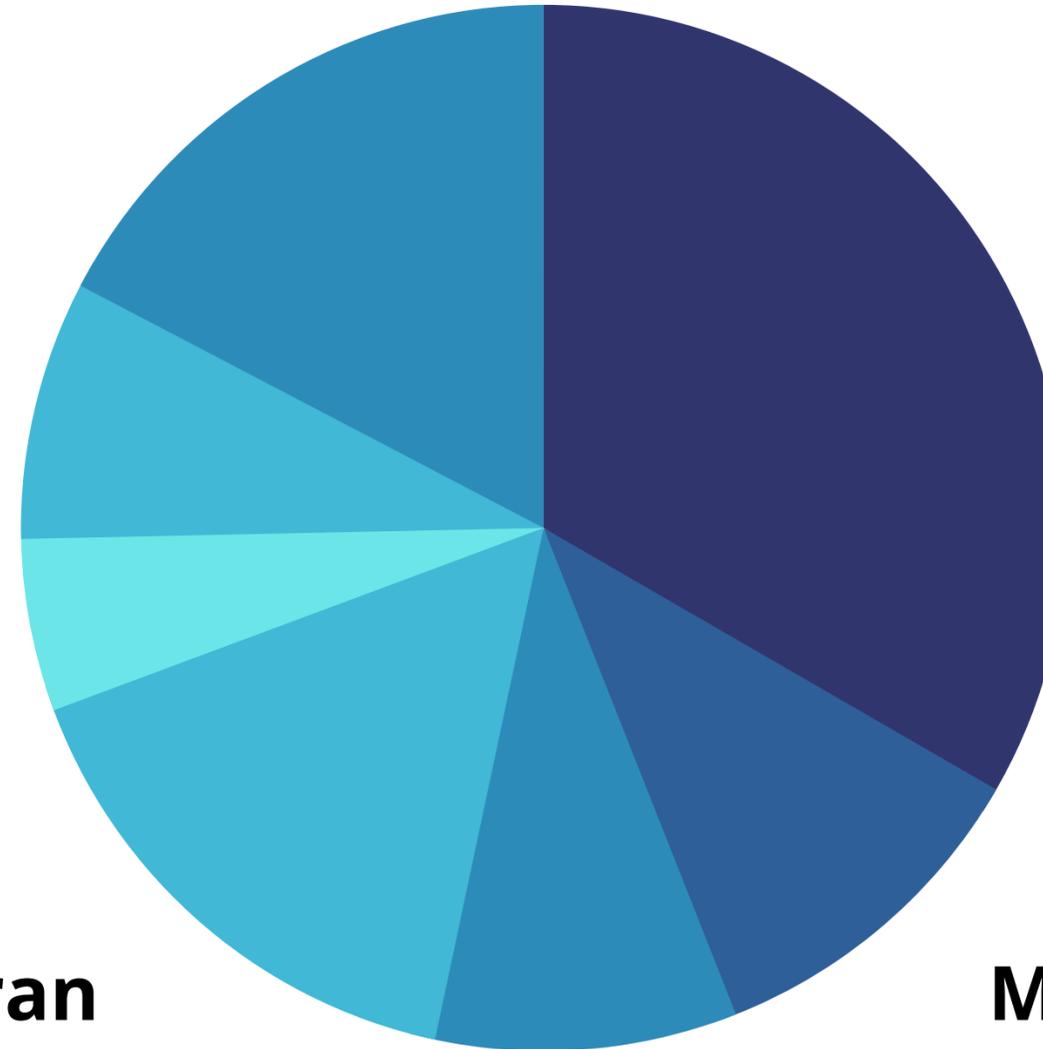
Penyunatan anggaran
8%

Penyalahgunaan wewenang
5.3%

Penyalahgunaan anggaran
16%

Mark Up
10.7%

Penggelapan
9.3%



Mengapa Korupsi di Sekolah Banyak Terjadi?



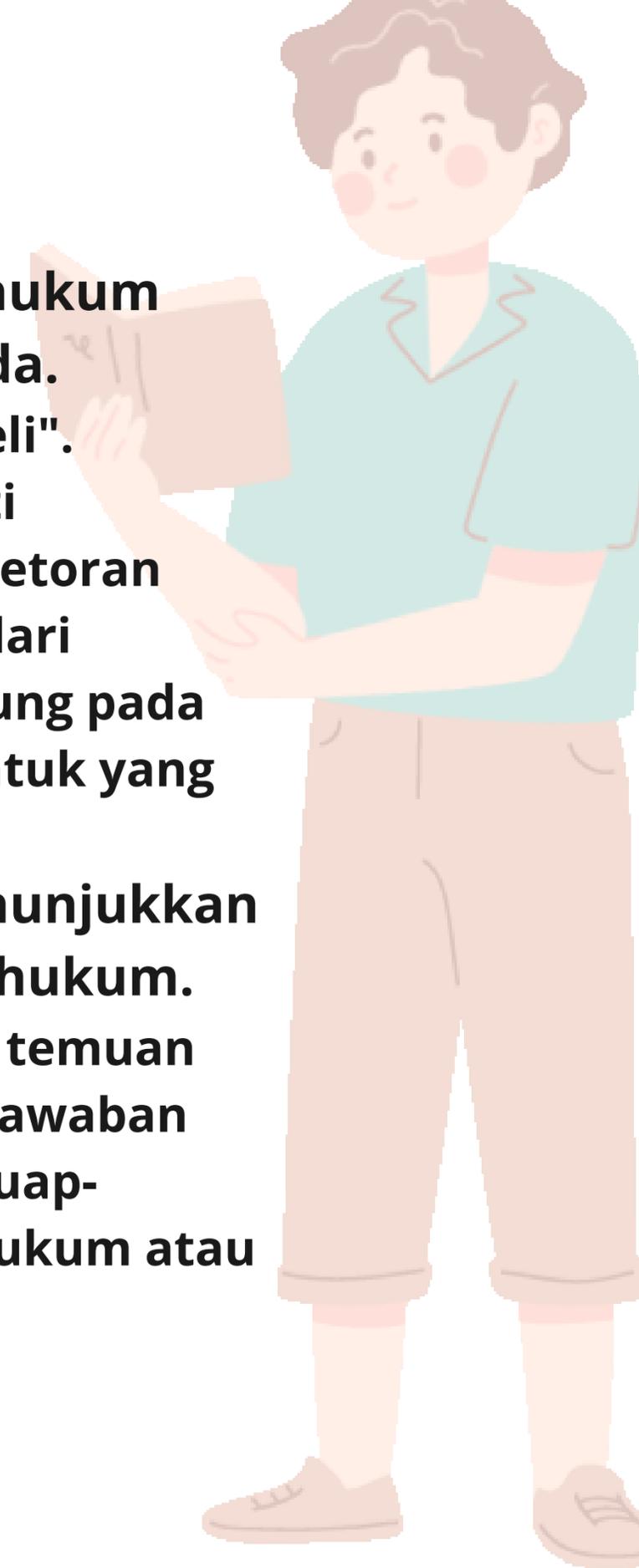
- Habit "bagi-bagi kue" di sekolah:
 - Pentingnya integritas dan komitmen antikorupsi kepala sekolah
- Dampak dari korupsi dalam skala lebih besar (jual beli jabatan kepala sekolah dan pungli/ pemerasan dari pemda, aparat penegak hukum, atau pihak lain).
- Pengelolaan anggaran sekolah, khususnya dana BOS, yang kurang melibatkan unsur komite sekolah dan wali murid.
 - Komite sekolah dalam hal ini dapat memainkan peran vital sebagai counterpart sekolah dalam paradigma *check and balances*. Namun dalam implementasinya, komite sekolah kerap tidak dilibatkan secara substantif.
- Pengelolaan anggaran sekolah yang tidak akuntabel dan transparan.
 - Padahal, transparan merupakan prinsip yang wajib dijunjung sekolah. Dalam pengelolaan dana BOS, misalnya, sekolah wajib mengumumkan laporan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.
 - ICW pada 2013 sampai bersengketa ke Komisi Informasi dan mengajukan eksekusi putusan Komisi Informasi ke pengadilan untuk mendapat laporan dana BOS.

64 kepala sekolah di Indragiri Hulu diberitakan mengundurkan diri karena diperas oleh oknum Kejari terkait dana BOS.

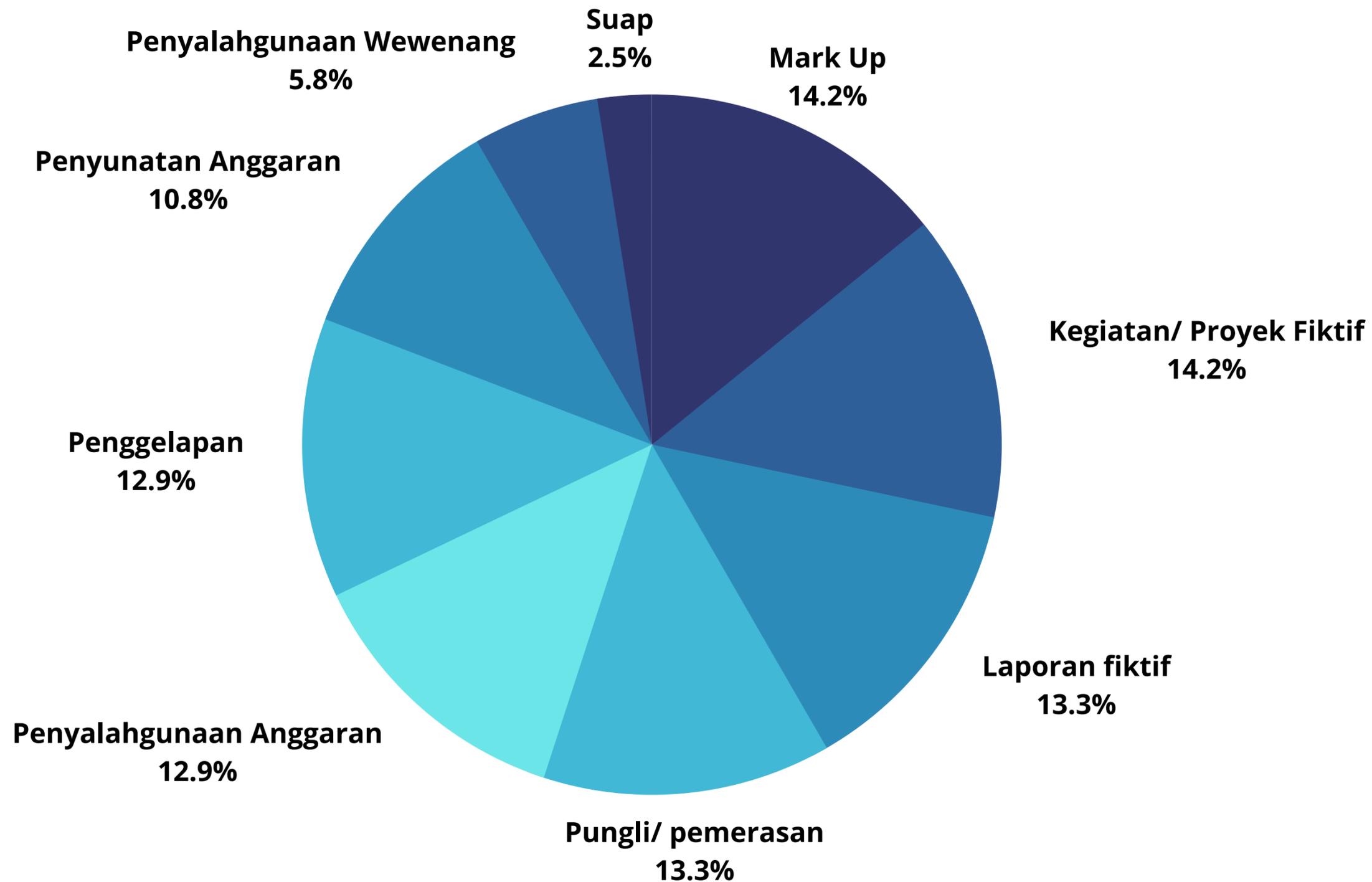
- Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Kasi Pidana Khusus, dan Kasubsi Barang Rampasan ditetapkan sebagai tersangka
- Modus: Kepala sekolah diduga dipanggil oleh Kejari di luar kepentingan penyelidikan, tanpa surat pemanggilan resmi, dan dimintai uang.



- Kasus korupsi oleh penegak hukum memiliki tingkat bahaya ganda.
 - Penindakan menjadi "jual-beli".
 - Jika kepala sekolah menuruti permintaan tersebut, uang setoran sudah barang pasti berasal dari anggaran sekolah dan berujung pada korupsi dana BOS dalam bentuk yang lain.
- Kasus tersebut sekaligus menunjukkan bobroknya institusi penegak hukum.
 - Tak menutup kemungkinan, temuan dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS berakhir dengan suap-menyuap dengan penegak hukum atau pihak terkait lainnya.



Modus Korupsi Sektor Pendidikan



Meski tidak berbeda jauh, lebih dari setengah korupsi sektor pendidikan yang ditindak APH pada 2016 hingga September 2021 terkait dengan PBJ.

- **61 kasus (49%) korupsi PBJ merupakan proyek infrastruktur (pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pembangunan laboratorium, perpustakaan, dll)**



Mengenai PBJ bangunan fisik, persoalan yang ICW temukan tidak hanya kasus korupsi yang ditindak APH.

Dalam penelitian ICW bersama KIPRA, Harmoni Alam Papua, dan Belantara Papua pada Juli-Oktober 2021, kami menemukan sejumlah PBJ sektor pendidikan, khususnya pembangunan fisik, yang:

- Tidak sesuai kebutuhan penerima manfaat (sekolah);**
- Tidak dapat digunakan karena belum dilengkapi sarpras atau bahkan mangkrak;**
- Kualitas kurang baik/ tidak tahan lama.**



Pembangunan Ruang Kelas di SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Mlaswat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Menggunakan APBD TA 2016



Pembangunan Lab IPA Fisika di SMPN 1 Haha, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Menggunakan APBD TA 2019

Sebaran daerah terjadinya penindakan korupsi sektor pendidikan 2016-September 2021

No.	Daerah	Jumlah Kasus yang Ditindak APH	No.	Daerah	Jumlah Kasus yang Ditindak APH
1	Sulawesi Selatan	23	18	Sumatera Barat	6
2	Sumatera Utara	21	19	Sumatera Selatan	6
3	Jawa Barat	20	20	Kalimantan Tengah	5
4	Jawa Timur	17	21	DKI Jakarta	4
5	NTT	11	22	Kalimantan Barat	4
6	Aceh	10	23	Maluku Utara	4
7	Sulawesi Utara	10	24	Papua Barat	4
8	NTB	9	25	Bali	3
9	Sulawesi Tenggara	9	26	Jambi	3
10	Bengkulu	8	27	Kalimantan Selatan	3
11	Kepulauan Riau	8	28	Sulawesi Barat	3
12	Riau	8	29	Nasional	2
13	Jawa Tengah	7	30	Kalimantan Timur	2
14	Lampung	7	31	Kepulauan Bangka Belitung	2
15	Maluku	6	32	Sulawesi Tengah	2
16	Banten	6	33	Yogyakarta	1
17	Papua	6	TOTAL		240

- Daerah dengan kasus korupsi sektor pendidikan terbanyak belum tentu merupakan daerah yang paling korup mengelola anggaran pendidikan.
- Tingginya angka kasus bisa jadi dikarenakan keaktifan APH, inspektorat, atau masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi.
- Namun, data ini patut menjadi bahan evaluasi APH, Kemendikbud, dan pema terkait untuk mengawasi anggaran pendidikan.

SIMPULAN

- Maraknya penindakan korupsi pendidikan dari tahun ke tahun patut dilihat sebagai indikator bahwa korupsi sektor pendidikan juga masih masif terjadi.
- Korupsi sektor pendidikan tak kenal batas nilai kemanusiaan:
 - Sejumlah kasus menunjukkan adanya korupsi bantuan untuk siswa miskin dan gaji guru honorer yang jumlahnya sudah sangat kecil.
 - Korupsi tetap terjadi di tengah Covid-19, yaitu terkait BOP dari Kemenag.
- Ada indikasi korupsi "kecil-kecilan" di sekolah berkorelasi dengan korupsi dengan skala lebih besar, misalnya oleh pemda dan kepala daerah. Begitu pula korupsi di Dinas Pendidikan sebagai dampak korupsi skala lebih besar (korupsi dalam seleksi kepala sekolah, kepala Dinas Pendidikan/ jabatan strategis lainnya, korupsi proyek pendidikan).
 - Penanganan pencegahan korupsi sektor pendidikan seharusnya sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan politik.
 - Penguatan peran APIP untuk mencegah terjadinya jual beli jabatan dan pungli/ pemerasan dari pemda ke sekolah. Adakah kanal pengaduan aman yang telah disediakan?

Simpulan

- PBJ adalah proses yang sangat rentan dikorupsi.
 - Pentingnya transparansi dan pengawasan PBJ. Saat ini, SKPD kerap tidak mempublikasikan informasi pengadaan di LPSE daerah.
 - Pentingnya pengawasan PBJ.
 - Adanya proyek mangkrak namun telah dilakukan pembayaran menimbulkan pertanyaan: bagaimana pengecekan yang dilakukan SKPD sebelum serah terima hasil?
- DAK dan dana BOS yang ditujukan untuk akselerasi pelayanan pendidikan di daerah dan peningkatan mutu sekolah banyak dikorupsi.
 - Perubahan mekanisme transfer dana BOS hanya akan meminimalisir korupsi dana BOS yang melibatkan Dinas Pendidikan (pungli/ pemerasan pencairan, laporan fiktif), tetapi korupsi dana BOS di sekolah tetap marak.
 - Menekan potensi penyalahgunaan Dana BOS:
 - Pengelolaan anggaran sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
 - Strategi implementasi atas mandat transparansi dana BOS?
 - Penguatan peran Komite Sekolah dalam perencanaan dan pengawasan dana BOS.